

---

---

## HAMBATAN DALAM UPAYA ELIMINASI PEKERJA ANAK DI TAMBANG ARTISANAL KOBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (2014-2019)

I Kadek Putra Pratama<sup>1)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

---

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis hambatan dalam upaya eliminasi pekerja anak di pertambangan artisanal kobalt Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan pendekatan kualitatif. Studi ini menerapkan teori dependensi, konsep *Multinational Cooperation*, dan *poverty traps* guna mengetahui penyebab dari hambatan. Teori dependensi menjelaskan ketergantungan RDK sebagai konsekuensi pengintegrasian ekonomi ke dalam sistem kapitalisme global. RDK diposisikan sebagai negara *periphery*—memenuhi kepentingan negara *semi-periphery* dan *core*. RDK menjadi tempat ekstraksi kobalt terbesar di dunia dengan komposisi pekerja murah yang berlimpah serta maraknya praktik pekerja anak. Ketergantungan tersebut diperkuat oleh kehadiran perusahaan multinasional, seperti CDM dan Huayou Cobalt. Pada gilirannya, kondisi tersebut mampu melanggengkan kemiskinan ekstrem di RDK. *Poverty traps* hadir guna menganalisis hubungan antara kemiskinan yang persisten dengan fenomena pekerja anak RDK, tepatnya di wilayah sabuk kobalt (Provinsi Haut-Katanga dan Lualaba).

**Kata-kunci:** Dependensi, *Multinational Cooperation*, Pekerja Anak Kobalt, *Poverty Traps*, Republik Demokratik Kongo

---

### Abstract

*This research aims to analyze the obstacles in efforts to eliminate child labor in artisanal cobalt mining in the Democratic Republic of the Congo (DRC) using qualitative research methods. This study uses the theory of dependency, the concept of Multinational Cooperation, and the poverty traps to figure out the causes of obstacles. Dependency theory explains that DRC dependence arises as a consequence of economic integration into the global capitalist system. DRC is responsible for becoming a periphery country—fulfilling the interests of semi-periphery and core countries. DRC is the world's largest artisanal cobalt extraction site with an abundant composition of cheap labor and rampant child labor practices. This dependence is strengthened by the presence of multinational companies, such as CDM and Huayou Cobalt. Furthermore, these conditions are capable of perpetuating extreme poverty in DRC. Poverty traps are here to analyze the relationship between persistent poverty and the phenomenon of child labor in the DRC, specifically in the cobalt belt region (Haut-Katanga and Lualaba Provinces).*

**Keywords:** Cobalt Child Labor, Democratic Republic of the Congo, Dependency, Multinational Corporation, Poverty Traps

---

### Kontak Penulis

I Kadek Putra Pratama

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. Jend. Sudirman, Dangan Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234

Telp: 6281239726787

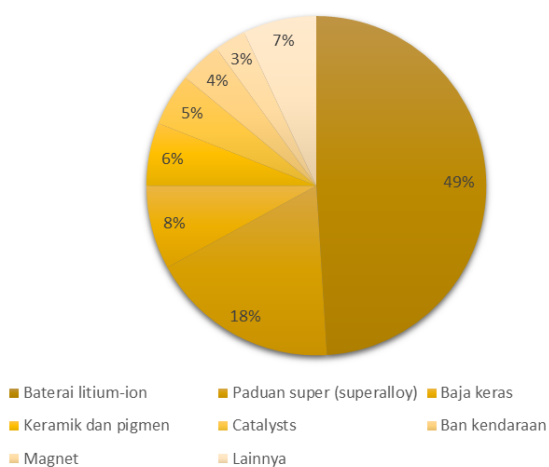
E-mail: kadek.putra@student.unud.ac.id

## PENDAHULUAN

Republik Demokratik Kongo (RDK) hadir sebagai negara pemasok kobalt terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas 60-70% suplai kobalt global (Shedd, 2018). Pada tahun 2017, kobalt berada di urutan kedua sebagai komoditas ekspor terbesar RDK dengan nilai transaksi mencapai US\$ 3,3 juta (Matezo, 2020: 98). Realitas tersebut cukup mencerminkan ketergantungan RDK terhadap komoditas kobalt. Pada gilirannya, kondisi demikian justru mendukung munculnya hambatan bagi RDK untuk mengeliminasi praktik pekerja anak di sektor pertambangan artisanal kobalt.

Sebaran tambang kobalt di RDK terbilang hanya terfokus pada bagian tenggara, tepatnya di Provinsi Haut-Katanga dan Lualaba. Di wilayah tersebut, pertambangan kobalt dengan metode artisanal sama populer dengan pertambangan kobalt berbasis industri atau *Large Scale Mining* (LSM). Tidak seperti LSM yang menggunakan mesin atau teknologi lainnya, pertambangan artisanal terasosiasi dengan aktivitas menambang menggunakan perkakas (palu, kapak, dan sekop). Pada tahun 2014 hingga 2019, sebanyak 40% ekspor kobalt RDK berasal dari pertambangan artisanal (Cooper et al., 2019).

**Gambar 1.** Persentase Penggunaan Kobalt Global Tahun 2015



Sumber: (Dias et al., 2018); diolah peneliti

Kobalt merupakan bahan baku utama pembuatan baterai litium-ion (US Geological Survey, 2022). Pada tahun 2015, sebanyak 49%

dari total kobalt global didistribusikan untuk pembuatan baterai litium-ion. Hingga data terakhir mencatat pada tahun 2019, sebesar 60% kobalt global diperuntukkan untuk baterai litium-ion. Tiongkok hadir sebagai produsen baterai litium-ion terbesar di dunia, dengan alokasi pemanfaatan sebesar 69%. Tidak mengherankan jika empat dari lima perusahaan baterai terbesar di dunia (Panasonic, Samsung SDI, LG Chem, dan Ampere Technology Limited/ATL) mengoperasikan pabrik mereka di Tiongkok.

Sejak tahun 2015, permintaan dunia akan baterai litium-ion meningkat 30% tiap tahunnya (McKinsey, 2022). Setidaknya 10-25% kobalt global untuk pembuatan litium-ion berasal dari pertambangan artisanal kobalt di RDK. Persentase tersebut pun diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Daya tarik kobalt artisanal terletak pada harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kobalt yang diproduksi oleh LSM. Selain itu, perusahaan dapat dengan mudah membeli kobalt artisanal tanpa harus terikat kontrak atau perjanjian formal (Mucha, 2018). Di sisi lain, segala potensi yang dimiliki RDK pada sektor artisanal kobalt, tampaknya telah berimplikasi terhadap lahirnya fenomena pekerja anak.

Praktik pekerja anak lumrah terjadi di negara Dunia Ketiga—*lower middle-income economies* (Alvina et al., 2021: 178). Dibandingkan dengan negara maju, peran anak di negara terbelakang cenderung tidak jelas dan kondisinya tidak menguntungkan. Anak-anak di kawasan Sub-Sahara Afrika telah tumbuh menjadi individu yang wajib bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. UNICEF (2014) memperkirakan sebanyak 40.000 anak RDK bekerja di tambang artisanal kobalt pada tahun 2014. Mayoritas dari mereka merupakan anak laki-laki dengan rentang usia antara 6 hingga 18 tahun (OCHA, 2015). Kapasitas kerja yang dapat mereka lakukan diantaranya; menggali (pada permukaan), mencacah, mencuci, dan mengangkut karung berisi kobalt dari penambangan menuju truk pengangkut.

Permasalahan muncul ketika anak-anak telah bekerja pada sektor yang membahayakan nyawa mereka. Ketiadaan standar dalam keselamatan kerja, menyebabkan kecelakaan fatal yang melibatkan anak jamak terjadi. Selain itu, terdapat risiko kesehatan yang harus ditanggung oleh mereka.

Pemerintah RDK sejatinya telah meratifikasi konvensi ILO 138 (*Minimum Age Convention*) dan ILO 182 (*Worst Forms of Child Labour*) pada tahun 2001. Adapun konvensi tersebut menetapkan standar usia anak diperbolehkan untuk bekerja yakni tidak kurang dari 15 tahun. Hal tersebut mempertimbangkan hak dan kewajiban anak untuk memperoleh pendidikan (*compulsory education*) (ILO, 2017). Di RDK, berbagai instrumen hukum nasional juga telah disahkan, seperti *The Labor Code 2002*, *The Child Protection Code 2009*, dan *National Action Plan/NAP 2015*. Sejak tahun 1998, RDK telah memiliki Dewan Anak Nasional (*Conseil National de l'Enfant*) yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan kesejahteraan anak (Cooper et al., 2019).

RDK menetapkan 16 tahun sebagai batas usia minimum anak bekerja, dan 18 tahun untuk bekerja pada sektor yang berbahaya (tentara anak, penjual narkoba, pekerja seks komersial, dan pekerja tambang). Konstitusi RDK juga menyuarakan jaminan pendidikan gratis bagi anak-anak. Hal tersebut dilakukan guna mereduksi angkatan kerja pada anak-anak.

**Gambar 2.** Jumlah Pekerja Anak di Pertambangan Artisanal Kobalt RDK



Sumber: (Tsurukawa, 2011; Cooper et al., 2019; UNICEF, 2014; Kara S., 2018; Byline Times, 2020); diolah peneliti

Melalui grafik tersebut, dapat diperoleh simpulan bahwa tren pekerja anak di pertambangan artisanal kobalt RDK cukup berfluktuasi. Hal tersebut menandakan pemerintah RDK belum cukup konsisten dan cakap dalam upayanya mengeliminasi praktik pekerja anak. Minimnya anggaran, lemahnya kualitas fungsi pengawasan, serta kemiskinan ekstrem di RDK telah menyebabkan praktik pekerja anak sulit untuk dihapuskan. Di sisi lain, kehadiran perusahaan multinasional nyatanya berimplikasi terhadap hambatan bagi RDK dalam upaya eliminasi pekerja anak di sektor pertambangan artisanal kobalt.

Congo Dongfang Mining International SARL (CDM)—perusahaan asal Tiongkok—pembeli sekaligus pemilik pertambangan artisanal kobalt terbesar di RDK (Cooper et al., 2019). CDM ialah pabrik peleburan kobalt (*smelter*) yang hasilnya diekspor ke induk perusahaan, yakni Huayou Cobalt untuk dilakukan proses pemurnian (*refinery*). Kobalt yang telah diproses bermuara pada perusahaan elektronik terkemuka, seperti Samsung, Apple, dan LG (Frankel, 2016). Sejak pengoperasian pertamanya pada tahun 2006, CDM telah mencatatkan histori buruk terkait keterlibatan praktik pekerja anak. Kendati, telah banyak preskripsi yang mengatur etika perusahaan multinasional, khususnya tanggung jawab atas pemantauan rantai pasokan.

Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan empat literatur sebagai kajian pustaka. Tulisan pertama—*“Penyebab Ketidakpatuhan Kongo terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Anak di Pertambangan Kobalt,”* oleh Nabila (2020). Tulisan tersebut menerangkan bahwa konflik sumber daya yang diperparah dengan praktik korupsi oleh pejabat publik di RDK telah berimplikasi terhadap kasus pekerja anak di pertambangan kobalt. Tulisan tersebut membantu peneliti dalam melihat posisi RDK yang berdampingan dengan sumber daya alam. Namun, penulis

belum menjelaskan keterkaitan antara realitas kemiskinan di RDK yang jelas berujung praktik pekerja anak. Oleh karena itu, peneliti menghadirkan "*Poverty, Education and Child Labour in Aligarh City-India*," oleh Ayaz Ahmad (2013).

Tulisan Ahmad (2013) mengamini kemiskinan—determinan utama penyebab langgengnya praktik pekerja anak. Anak-anak telah diposisikan pada kondisi yang merugikan akibat minimnya akses memperoleh pendidikan. Kendati demikian, tulisan tersebut belum menganalisis keterlibatan aktor yang justru berkontribusi pada maraknya kasus pekerja anak. Sehubungan dengan itu, Wangusa (2013)—"*Multinational Corporations, Human Rights And Child Labour in Ghana*" menyebut bahwa berbagai perusahaan asing telah mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia khususnya pada pekerja anak. Tulisan tersebut membantu peneliti untuk melihat bagaimana signifikansi peran MNC dalam kaitannya dengan fenomena pekerja anak. Namun, penulis tidak mengangkat perihal sistem internasional yang berperan besar dalam menyediakan wadah bagi perusahaan multinasional untuk menciptakan suatu ketergantungan.

Peneliti menghadirkan tulisan karya Dewi et. al., (2022)—"*Penyebab Kegagalan Pengentasan Masalah Pekerja Anak di Tambang Mika Jharkhand India*" sebagai pustaka keempat. Tulisan tersebut menjelaskan kegagalan pengentasan pekerja anak di pertambangan mika Jharkhand, India yang disebabkan oleh lingkaran kemiskinan. Selain itu, sistem internasional yang eksploitatif telah menempatkan Jharkhand pada posisi pinggiran yang bergantung terhadap industri ekstraktif mika global. Tulisan tersebut berkontribusi dalam memahami hubungan antara kemiskinan, posisi negara pada sistem internasional, serta peran MNC, dalam kaitannya dengan fenomena pekerja anak.

Penelitian ini berupaya menganalisis keterkaitan antara perusahaan multinasional

(CDM & Huayou Cobalt), posisi RDK dalam industri ekstraktif kobalt global, elite politik, serta kondisi kemiskinan ekstrem di RDK yang telah melahirkan hambatan dalam upaya eliminasi pekerja anak di pertambangan artisanal kobalt.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori dan konsep sebagai pisau analisis serta hasilnya berupa data deskriptif. Penulis memanfaatkan teori dependensi, konsep *Multinational Cooperation*, dan konsep *poverty traps* guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini ialah pola interaksi antara negara, rakyat RDK, dan MNC serta kaitannya dengan hambatan dalam upaya eliminasi pekerja anak di tambang artisanal kobalt.

Pada teknik analisis data, penulis menerapkan *thematic analysis* yang terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya; pemahaman data; penyusunan kode; dan pencarian tema. Adapun dalam tahapan tersebut penulis menghimpun berbagai macam data terkait topik penelitian, seperti data; pertambangan artisanal kobalt di RDK, pekerja anak, MNC kobalt, rantai suplai kobalt global, dsb.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dependensi RDK terhadap Ekstraksi Kobalt

Ketergantungan RDK terhadap permintaan kobalt global merupakan konsekuensi dari pengintegrasian ekonomi ke dalam sistem internasional. Ketergantungan diartikulasikan sebagai situasi perekonomian negara yang dikondisikan oleh dominasi perkembangan ekonomi negara lain (Santos, 1970: 234). Teori dependensi hadir guna mengkritik struktur sistem internasional yang telah menyebabkan suatu negara menjadi maju (*developed*) dan negara lainnya menjadi terbelakang (*underdeveloped*). Kondisi tersebut lantas menjadi hambatan struktural bagi RDK untuk mengeliminasi praktik pekerja anak di sektor pertambangan artisanal kobalt.

#### a. *International Division of Labour (IDL)*

Ketergantungan telah menghasilkan pembagian kerja dalam sistem internasional atau IDL. Terdapat negara *periphery* (pinggiran) sebagai tempat ekstraksi sumber daya alam guna memenuhi kepentingan industri negara *semi-periphery* dan *core* (Ghosh, 2019). Praktik kolonialisme dan imperialisme menjadi determinan dari lahirnya IDL. Produk agrikultur dan material mentah umumnya diperoleh dari negara koloni untuk selanjutnya diolah oleh negara imperialis seperti Inggris dan Perancis (Lim, 2017: 3). Eksploitasi dipertahankan hingga menyebabkan banyak negara koloni menjadi terbelakang, tidak terkecuali RDK.

Pemenuhan kekuasaan dan dominasi atas faktor ekonomi menjadi sifat yang melekat dari praktik kolonialisme yang terjadi di RDK (Butt, 2013: 894). Setelah berakhirnya rezim perbudakan oleh Raja Leopold II, pada tahun 1908, RDK resmi menjadi koloni Belgia hingga tahun 1960. UMHK (Union Minière du Haut-Katanga) ialah perusahaan mineral milik Belgia yang didirikan di RDK pada tahun 1906. UMHK menguasai lebih dari tujuh puluh persen ekonomi RDK dengan mengeksploitasi kobalt dan tembaga yang seluruh pendapatannya didistribusikan kepada Belgia (Gulley, 2022: 4). UMHK bertransformasi menjadi produsen kobalt terbesar di dunia hingga masa RDK menasionalisasinya menjadi Gécamines pada tahun 1966.

Ketergantungan terhadap industri ekstraktif dapat berujung kepada keterbelakangan ekonomi. Hal tersebut terjadi akibat pertukaran benefit tidak berlangsung secara adil (Namkoong, 1999: 130). Sebagai penyuplai kobalt mentah terbesar di dunia, RDK hanya mampu menyumbang 0,4% dari total produksi *refined cobalt* global (Dias et al., 2018: 56). Di sisi lain, Tiongkok sebagai produsen *refined cobalt* terbesar di dunia, memperoleh 70% kobalnya dari RDK. Sebagai perbandingan, harga kobalt mentah ialah US\$ 881/ton, sedangkan *refined cobalt* US\$ 60.000-90.000/ton (Scheele et al., 2016). Minimnya hilirisasi komoditas tambang,

menyebabkan RDK bekuat pada situasi ekonomi yang kurang menguntungkan.

Upaya pelarangan ekspor kobalt mentah sesungguhnya telah beberapa kali diagendakan oleh pemerintah RDK, tepatnya pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Namun, minimnya kapabilitas sumber daya manusia serta infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan program hilirisasi tidak kunjung terealisasi (Green Car Congress, 2021). Alhasil, pemerintah RDK tidak memiliki banyak pilihan selain bergantung pada sektor ekstraksi kobalt.

Pascaperang Dunia II, muncul dependensi baru (*a new type of dependency*) yang ditandai dengan maraknya penanaman modal oleh perusahaan multinasional (MNC)—berorientasi pada pasar domestik di negara-negara terbelakang. Rasionalisasinya ialah cadangan pekerja murah yang berlimpah (Frank, 1980: 283). Kehadiran MNC juga diyakini sebagai bentuk penjajahan gaya baru (*neo-imperialism*). MNC telah bertindak ekspansif dan eksploitatif terhadap suatu negara demi kepentingan golongan tertentu sembari menumbuhkan ketergantungan yang berimbas pada keterbelakangan ekonomi (Köksal, 2006). Praktik tersebut akan terus bertahan dan kian menguat sejalan dengan dependensi negara penyuplai sumber daya terhadap MNC.

Dalam konteks rantai suplai global, RDK menjadi surganya tempat penambangan (*mining*) dan peleburan (*smelting*) bijih kobalt. Setiap tahunnya, puluhan hingga ratusan ribu ton kobalt mentah diekspor RDK ke beberapa negara industri untuk selanjutnya melewati proses pemurnian (*refinery*). Adapun beberapa negara tujuan ekspor kobalt RDK diantaranya Korea Selatan, Singapura, dan yang terbesar Tiongkok sebanyak 80% (Kahozzi, 2018). Selanjutnya, kobalt yang telah dimurnikan, diekspor menuju negara industri seperti Jepang, negara kawasan Eropa, hingga Amerika Serikat untuk diolah dan diproses kembali sebagai material pembuatan baterai litium-ion dan komponen elektronik.

Permasalahan yang terjadi di RDK ialah MNC dan sektor artisanal kobalt telah berkolaborasi memunculkan problem perihal pekerja anak. Selaku aktor kapitalis, CDM memandang persoalan tersebut sebagai tantangan sekaligus peluang memperoleh keuntungan ekonomi. Praktisnya, MNC senantiasa mengejar keunggulan kompetitif atas perusahaan lain dengan mereduksi pengeluaran dan tidak ragu mempekerjakan anak dalam skala yang besar (Edmonds & Pavcnik, 2006: 120). Kendati CDM teguh pada pandangannya bahwa ia tidak mempekerjakan anak, namun temuan oleh lembaga/instansi independen dapat dijadikan justifikasi atas keterlibatan CDM dengan pekerja anak. Oleh karenanya, asumsi IDL terkait siasat perusahaan membidik negara dengan pekerja murah dan regulasi buruh yang lemah dapat divalidasi dan relevan.

IDL bertendensi untuk menciptakan ruang eksklusivitas yang akhirnya memunculkan sedikit negara maju (*core*). Benua Afrika hadir sebagai sentra negara *periphery* dalam sistem internasional. Dari total 46 negara *Least Developed Countries* (LDCs), 33 di antaranya merupakan negara-negara di kawasan Afrika, dan Republik Demokratik Kongo (RDK) menjadi salah satunya (World Bank, 2017). Di sisi lain, RDK tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas kegagalan untuk mereposisi statusnya di dalam IDL. Andre Frank menegaskan bahwa negara *core* akan selalu mempertahankan relasi kesenjangan yang terjadi. Negara-negara di bagian Eropa Barat dan Amerika Utara secara sengaja mempertahankan kondisi ketergantungan pada ekonomi internasional (Schmitd, 2017). Pada akhirnya, mekanisme tersebut mencegah negara-negara terbelakang untuk berkembang.

### **b. Class Distinction**

Pengelompokkan kelas atau strata ekonomi terjadi hampir di seluruh negara. Elite politik dan elite ekonomi senantiasa bekerja sama untuk memupuk kekayaan mereka. Dalam konteks perdagangan lintas negara, relasi yang ada signifikan menghasilkan ketimpangan terhadap negara tuan rumah atau *host country*.

Eksistensi CDM dan Huayou Cobalt ialah *output* dari relasi para elite RDK dan Tiongkok yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian bernama Sicomines (*The Sino Congolaise des Mines*). Lebih lanjut, *outcome* dari kesepakatan tersebut nyatanya tidak berpihak kepada masyarakat RDK secara luas. Tidak terkecuali dalam kaitannya dengan praktik pekerja anak.

Sicomines—proyek “*minerals for infrastructure*” diproyeksikan ke dalam dana pembangunan infrastruktur oleh Tiongkok kepada RDK senilai 9 miliar USD. Sebagai imbalannya, konsorsium Tiongkok (salah satunya Huayou Cobalt) memiliki hak eksploitasi tembaga dan kobalt sebesar 68%—sisanya dimiliki RDK melalui Gécamines. Pada Mei 2008, pemerintah RDK di bawah kepresidenan Joseph Kabila menyambut baik dan menyetujui kesepakatan tersebut. Di sisi lain, IMF khawatir perihal Sicomines yang diprediksi membebani RDK pada beban utang berkelanjutan. Penduduk di Provinsi Haut-Katanga juga skeptis terhadap klaim Sicomines yang akan membantu RDK untuk berkembang. Mereka mempercayai investasi Tiongkok tidaklah lebih dari upaya mengontrol dan mengeksploitasi sumber daya kobalt, sama seperti yang dilakukan kolonialis Eropa sebelumnya (Goethals et al., 2009). Pada gilirannya, kehadiran CDM sebagai bagian dari entitas konsorsium Tiongkok justru berimplikasi terhadap fenomena pekerja anak di RDK. Temuan Meyer S. (2018) memperlihatkan aktivitas pekerja anak berusia 11 tahun di tambang artisanal kobalt Kasulo milik CDM.

Laporan Amnesty International & AfreWatch (2016: 8) dan liputan CNN (2018) menunjukkan hasil senada perihal praktik pembelian kobalt oleh CDM yang tidak bertanggung jawab. CDM secara sadar membeli kobalt dari Rumah Dagang Musompo—tempat transaksi kobalt dengan campur tangan pekerja anak. Problematika perihal kasus pekerja anak bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2008, Bloomberg Markets menuduh Huayou Cobalt telah membeli kobalt dari pekerja anak. Huayou Cobalt memberi tanggapan dengan



berkomitmen untuk mengawasi lebih ketat rantai pasokan kobalt yang mereka beli (Clark et al., 2008). Namun, komitmen tersebut seakan menjadi angin lalu.

RDK sejatinya memiliki segudang produk hukum terkait isu pekerja anak, namun dalam praktiknya, nihil prestasi. SAESSCAM (*The Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining*) sebagai agensi pemerintah—mengawasi aktivitas pertambangan artisanal, nyatanya lemah dari segala sisi. Pada tahun 2014, RDK hanya memiliki 20 inspektur SAESSCAM. Para inspektur seringkali tidak memiliki dana, sarana komunikasi, serta transportasi yang memadai untuk melakukan pengawasan, serta tidak menerima pelatihan terkait “*the worst forms of child labor*” (US Department of Labor, 2014). Petugas SAESSCAM juga terkesan melakukan pembiaran terhadap pertambangan kobalt yang jelas terdapat pekerja anak di dalamnya. Bahkan tidak jarang ikut serta dalam pemungutan liar (Amnesty International & AfreWatch, 2016: 27).

Lahirnya relasi politis antara elite RDK dan Tiongkok sesungguhnya telah terjadi pada tahun 1967. Kala itu, Tiongkok mendukung Laurent Kabila (Ayah dari Joseph Kabila) untuk mendirikan partai People's Revolutionary Party (PRP), yang selanjutnya pada tahun 1997, Laurent terpilih menjadi presiden RDK (Nzongola, 2002). Kepemimpinannya juga menjadi tonggak lahirnya sektor pertambangan artisanal kobalt di RDK. Pada awal tahun 2000-an, Gécamines mengalami kemerosotan produksi akibat mismanajemen dan maraknya praktik korupsi. Merespons hal tersebut, pemerintah RDK mendorong masyarakat untuk membuka pertambangan kobalt secara mandiri (artisan) guna meningkatkan produksi kobalt dalam negeri.

Hubungan erat antara elite diperkuat ketika CDM terlibat di dalam agenda politik. Pada pemilihan presiden RDK periode 2011-2018, CDM menyumbangkan dana sebesar US\$ 20.000 untuk keperluan kampanye Joseph

Kabila. Kala itu Joseph kembali terpilih menjadi presiden dengan perolehan 48.95% suara. Di sisi lain, relasi elitis tampaknya berimbang terhadap kepentingan ekonomi yang dibawa oleh CDM. Pada tahun 2015, Huayou Cobalt membangun dua lokasi pemurnian kobalt di Haut-Katanga, setelah memperoleh izin untuk membeli hak tambang mineral milik perusahaan negara yakni Gécamines (Reuters, 2018).

Köksal (2006) menerangkan bahwa ketika ketergantungan ekonomi dicapai, perusahaan multinasional mampu melemahkan intensi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Pada tahun 2009, CDM menangguk operasi tambang artisanal di Kolwezi akibat jatuhnya harga kobalt. CDM menyetop total aktivitas pertambangan tanpa memperoleh persetujuan dari Kementerian Tenaga Kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum RDK. Pekerja mengeluhkan tindakan tersebut dan pemerintah dianggap apatis dengan tidak memberikan sanksi apa pun (Goethals et al., 2009).

Operasi pertambangan kobalt di Provinsi Haut-Katanga dan Lualaba semata-mata bentuk pendistribusian keuntungan dari tanah RDK menuju kantong para elite. Semua perusahaan asing yang bergerak di sektor kobalt belum memberikan manfaat bagi penduduk lokal RDK (Scheele et al., 2016). Di sisi lain, keterlibatan pekerja anak di tambang kobalt milik CDM menjadi potret bagaimana elite suatu korporat mampu mengaburkan batas-batas aturan yang semestinya tidak untuk ditawar. Pada akhirnya *international division of labour* dan *class distinction* bergerak beriringan di bawah payung besar bernama *global capitalism*.

### c. *Global Capitalism*

*Global capitalism* merupakan perwujudan kapitalisme yang telah merambah secara global dengan pasar bebas sebagai wahananya. Kondisi tersebut digerakkan oleh berbagai aktor struktural (perusahaan) yang saling bersaing guna mengakumulasi keuntungan

maksimal. *Global capitalism* tidak lebih dari mekanisme pemenuhan kepentingan ekonomi negara *core*. Dengan kata lain, pasar internasional merupakan manifestasi kepentingan negara-negara *core* ataupun *semi-periphery* yang direpresentasikan oleh perusahaan multinasional.

Pada kasus kobalt di RDK, CDM dan Huayou Cobalt menjadi aktor sentral di dalam arena *global capitalism*. Sebagai *top exporter* kobalt artisanal di RDK, CDM bertanggung jawab atas kelancaran rantai pasok kobalt kepada perusahaan komponen baterai, perusahaan baterai, hingga nantinya berakhir dan diproses oleh perusahaan perangkat elektronik. Perusahaan besar pembuat baterai litium-ion seperti Amperex Technology Ltd. (ATL), Samsung SDI, dan LG Chem mendapatkan suplai mereka dari CDM. Pada gilirannya, ketiga produsen baterai tersebut bertugas untuk memberi daya kepada beberapa merek perangkat elektronik terkemuka seperti Apple, Samsung, dan LG. Dengan kata lain, besar kemungkinan jika mayoritas perangkat elektronik masyarakat global saat ini telah terkontaminasi kobalt yang dihasilkan oleh pekerja anak di RDK.

*Global capitalism* akan tetap bertahan ketika aktivitas konsumsi masyarakat global tidak berhenti. Kondisi tersebut memastikan agar mesin kapitalis tetap berjalan, sehingga lebih banyak keuntungan yang dihasilkan. Pada pasar global, produksi kobalt tercatat meningkat sekitar 270%, dari 34.000 ton pada tahun 2000, menjadi 136.000 ton pada tahun 2017. Adapun International Energy Agency memperkirakan kebutuhan dunia terhadap kobalt akan mencapai angka 300.000 ton pada tahun 2026, serta meningkat drastis menjadi 500.000 ton pada tahun 2030 (al Barazi et al., 2017). Eskalasi tersebut linear dengan *demanding* masyarakat global terhadap barang-barang elektronik, khususnya gawai pintar dan komputer.

Tren penggunaan kendaraan listrik (*electric vehicles/EVs*) sebagai wujud dari transisi energi

juga memiliki andil terhadap peningkatan permintaan kobalt dunia. Setidaknya untuk memproduksi satu unit mobil listrik dibutuhkan 5,5 hingga 11 kg kobalt (Dias et al, 2018). Mercedes Benz dan BYD Company ialah produsen kendaraan listrik terbesar di dunia (di bawah Tesla dan Toyota) yang memperoleh suplai komponen baterai dari Shansan, yang juga menerima kobalt dari CDM (Amnesty International & AFREWATCH, 2016).

Pada intinya, *global capitalism* ingin menjelaskan gaya hidup konsumerisme masyarakat global telah memengaruhi tindakan perusahaan untuk terus mengembangkan dan memaksimalkan faktor produksi mereka. Namun sayangnya, tindakan tersebut telah menjurus kepada eksploitasi oleh MNC terhadap pekerja, khususnya di negara terbelakang (Minten, 2009: 1730). Keputusan tersebut diambil guna memperoleh lebih banyak keuntungan dari biaya produksi yang dapat ditekan. Alhasil, anak-anak menjadi angkatan kerja paling rentan terhadap isu pelanggaran hak-hak pekerja.

Sebagai perusahaan multinasional, CDM berkewajiban untuk selalu patuh dan aktif menjalankan aturan OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*) perihal uji tuntas suplai kobalt guna menjamin komoditas yang dikelola bersih dari keringat pekerja anak. Uji tuntas yang dimaksud ialah sebuah proses untuk mengidentifikasi (*identify*), mencegah (*prevent*), mengurangi (*mitigate*) dampak yang ditimbulkan terhadap pelanggaran HAM, salah satunya terkait pekerja anak.

CDM dan Huayou Cobalt juga tergabung ke dalam *Responsible Cobalt Initiative* (RCI) sejak awal pembentukan inisiatif tersebut pada tahun 2016. RCI digagas oleh Kementerian Perdagangan dan Ekspor Impor Mineral Tiongkok (Chinese Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters/ CCCMC) yang pada intinya memuat pedoman uji tuntas terkait rantai suplai kobalt. Perusahaan yang bergerak pada sektor kobalt



wajib bertindak transparan terhadap proses perolehan kobalt. Perusahaan wajib memiliki tim penilai untuk melaksanakan asesmen dan pemetaan terhadap kondisi pekerja.

Keberadaan pekerja anak di tambang artisanal kobalt RDK dapat disebut sebagai gambaran utuh dari mekanisme yang dihasilkan oleh sistem *global capitalism*. Sistem yang ada telah mengutamakan aspek ekonomis dengan mengkerdikan isu-isu strategis terkait aspek sosial dan lingkungan. Pada gilirannya, negara-negara terbelakang diposisikan pada kedudukan yang kurang menguntungkan. Dalam industri global, RDK diasosiasikan sebagai tempat berlangsungnya proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kobalt.

Melalui metode artisanal, RDK diwujudkan menjadi ladang ekstraksi kobalt yang inheren dengan proses yang kasar, kotor, beresiko, serta berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan pekerja. RDK didorong untuk senantiasa menghasilkan material mentah yang selanjutnya diekspor dan diolah oleh negara industri lainnya. Dalam nada filosofis, RDK dapat kita visualisasikan sebagai induk dari lahirnya berbagai macam embrio komponen produk elektronik guna memuaskan hasrat konsumsi masyarakat global kapitalis.

### ***Poverty Traps* dalam Praktik Pekerja Anak di RDK**

*Poverty traps* atau perangkap kemiskinan ialah kondisi keterbelakangan sosial yang sulit untuk dihapuskan karena ia telah membentuk suatu "lingkaran kemiskinan" (Matsuyama, 2010: 220). Oleh karenanya, muncul sebuah siklus yang menjadikan kemiskinan persisten dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Di RDK, lingkaran kemiskinan telah bertransformasi menjadi hambatan kultural akibat kebiasaan yang diturunkan secara lintas generasi. Keluarga miskin telah mewariskan nilai-nilai seperti pernikahan dini dan mengesampingkan aspek pendidikan bagi anak. Di sisi lain, eksistensi dari pekerja anak nyatanya telah melanggengkan (*perpetuating*) situasi kemiskinan dan menciptakan perangkap

kemiskinan. Ketidakberdayaan untuk mereparasi status sosio-ekonomi menyebabkan kemiskinan terus diwariskan. Minimnya akses terhadap sektor primer seperti kesehatan dan pendidikan telah memperparah kondisi kemiskinan di suatu negara, tidak terkecuali di RDK.

Kemiskinan diyakini sebagai satu-satunya kekuatan terbesar di balik permasalahan pekerja anak (Dwibedi & Chaudhuri, 2007: 4). Laporan World Bank (2018) menerangkan bahwa dua per tiga penduduk Republik Demokratik Kongo hidup di bawah garis kemiskinan. Tercatat 73% penduduk RDK, atau sekitar 60 juta orang, hidup dengan penghasilan kurang dari US\$1,90 per hari. Realitas tersebut memasukkan RDK ke dalam jajaran lima negara termiskin di dunia.

Ray (2002) menerangkan bahwa orang miskin tetap miskin dikarenakan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengenyam pendidikan. Bahkan bekerja sambil bersekolah ialah sesuatu yang tidak kompatibel bagi anak-anak. Di RDK, mahalnyanya biaya sekolah menjadi motif orang tua untuk tidak memberikan akses pendidikan secara penuh kepada anak-anak mereka. Kegagalan pemerintah RDK untuk mengimplementasikan Child Protection Code 2009 terkait jaminan sekolah gratis agaknya menjadi pemicu dari hal tersebut. Sebagian besar sekolah masih membebaskan biaya bulanan (*minerval*) kepada orang tua untuk menutupi biaya operasional, gaji guru, seragam, dan materi pembelajaran. Kondisi tersebut lantas berimbas terhadap keputusan anak-anak untuk bekerja.

Di RDK, orang dewasa menjadi penggerak sekaligus promotor bagi anak-anak untuk bekerja di tambang. Anak-anak bekerja atas izin sekaligus dorongan dari orang tua. *Poverty traps* memandang gejala tersebut sebagai fenomena yang lumrah. Orang tua akan mendorong anak mereka ke pasar tenaga kerja jika terjadi penurunan pendapatan rumah tangga (Basu & Van, 1998: 412). Pertimbangan orang tua untuk mengizinkan anak mereka

bekerja tidak sedikit dipengaruhi oleh pengalaman generasi sebelumnya. Artinya, orang tua dengan latar pendidikan rendah telah meningkatkan kemungkinan anak mereka untuk bekerja (Ray, 2002). Alhasil, stigma serta nilai yang diyakini oleh generasi sebelumnya berdampak signifikan bagi nasib dan masa depan generasi selanjutnya.

Maraknya pekerja anak telah berimbas pada angka keterisian bangku sekolah. Pada tahun 2017, tercatat 7.6 juta anak RDK berusia 5-17 tahun tidak dapat menikmati akses pendidikan. Haut-Katanga sebagai daerah pemasok utama kobalt menjadi provinsi dengan tingkat anak tidak bersekolah tertinggi di RDK—1,3 juta anak (OCHA, 2017). Pekerja anak yang bergiat pada sektor tambang acap mengalami diskriminasi dari lingkungan sekolah. Situasi tersebut lantas memicu anak-anak enggan untuk bersekolah (Aanval, et al., 2020: 11). Di sisi lain, tingkat pendidikan telah memengaruhi kualitas sumber daya manusia RDK. Pada tahun 2020, RDK menempati posisi 164 dari 174 negara terkait Indeks Kapital Manusia (*Human Capital Index/HCI*). Hal tersebut mengindikasikan bahwa seorang anak yang lahir di RDK hanya mampu mencapai 37% dari keseluruhan potensi yang mereka miliki.

Karakteristik pekerja anak di tambang artisanal kobalt RDK ialah mereka yang tidak dilengkapi alat keselamatan, seperti sarung tangan, *safety helmet*, dan masker muka. Paparan terhadap debu kobalt dapat mengakibatkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan alergi pada kulit. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan masalah pada saluran pernapasan, seperti asma, mengi, pneumonia, hingga penurunan fungsi paru-paru. Kobalt juga dipercayai sebagai zat karsinogen yang berpotensi menimbulkan kanker pada pekerja yang berisiko. Kelahiran bayi anensefali (kondisi tanpa struktur otak dan tengkorak yang utuh) sering terjadi di wilayah sekitaran tambang kobalt RDK. Anensefali terjadi akibat adanya paparan zat beracun dari lingkungan dan obat atau makanan yang dikonsumsi ibu selama masa kehamilan (WHO, 2006).

Pekerja anak di RDK biasa memikul karung kobalt dengan berat 20-40 kg setiap harinya tanpa mengenal kondisi cuaca. Aktivitas mengangkat beban berlebih pada anak dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang seperti cedera punggung, cedera otot, hingga kelainan bentuk sendi dan tulang (ILO, 2011). Di samping itu, kecelakaan tambang menjadi fenomena gunung es di RDK. Banyak kecelakaan kerja yang sengaja ditutupi dari pengawasan polisi dan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pekerja anak. Bahkan manajer tambang seringkali berkolusi dengan petugas utusan pemerintah dan polisi untuk menutupi kasus kecelakaan dan praktik pekerja anak (ABC News, 2022).

Pada tahun 2019, runtuhnya pertambangan artisanal kobalt di Provinsi Lualaba telah berujung pada tewasnya 43 pekerja artisanal, empat di antaranya pekerja anak, serta sepuluh anak lainnya mengalami cedera hingga kelumpuhan. Di sisi lain, anak-anak telah bekerja pada ekosistem yang tidak menguntungkan. Mereka hanya memperoleh upah sebesar 1,000-2,000 Franc Kongo (US\$ 1-2) per harinya. Tidak jarang anak-anak mengalami tindakan pelecehan dan pemerasan dari pekerja dewasa (Amnesty International & AfreWatch, 2016: 30).

*Poverty traps* memandang pernikahan anak sebagai faktor pendukung munculnya warisan kemiskinan. Fenomena tersebut memang marak terjadi di negara kawasan Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Mereka biasanya terkonsentrasi pada rumah tangga miskin dan kurang berpendidikan. Orang tua menganggap bahwa pernikahan anak dipandang sebagai cara untuk menafkahi masa depan anak mereka. Namun realitasnya, gadis yang menikah muda cenderung miskin dan akan tetap miskin (ICRW, 2006). Kondisi tersebutlah yang lumrah terjadi di RDK.

Sebanyak 74% perempuan RDK telah menikah pada usia 15-19 tahun (Jacques et al., 2017: 84). Keterkaitan antara pernikahan anak dengan kemiskinan tercermin dari frekuensi kasus

yang lebih sering terjadi pada daerah pinggiran (rural) seperti Provinsi Haut-Katanga dan Lualaba, dibandingkan perkotaan (urban) seperti Kota Kinshasa (ibukota RDK). Lebih lanjut, pernikahan anak nyatanya berimpak pada penurunan tingkat kesadaran akan pendidikan.

Di RDK, anak perempuan sering kali terpaksa putus sekolah ketika mereka telah menikah. Sebaliknya, anak-anak dengan tingkat pendidikan rendah berpeluang lebih tinggi untuk menikah pada usia muda (Jacques et al., 2017: 86). Pernyataan di atas tampaknya mampu menjustifikasi hubungan timbal balik antara tingkat pendidikan dengan eksistensi pernikahan pada anak. Sayangnya, anak-anak yang notabene belum matang baik secara emosional maupun finansial tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk membina rumah tangga mereka. Alhasil, sebanyak 70 hingga 80 persen kasus pernikahan di bawah usia delapan belas tahun berakhir dengan perceraian (Tahirih Justice Center, 2020). Pada gilirannya, pernikahan anak akan memunculkan keluarga baru di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut cukup disesali, mengingat keluarga dengan kualitas hidup yang baik merupakan salah satu pilar pembangunan suatu negara.

*Poverty traps* menerangkan bahwa salah satu alasan sulitnya mengentaskan kemiskinan ialah minimnya diversifikasi sektor kerja. Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan secara progresif, dibutuhkan penganekaragaman lapangan pekerjaan di negara dengan tingkat ketergantungan sumber daya mineral yang tinggi. Kendati sektor pertambangan telah berjalan produktif, sifatnya yang padat modal dan tidak berpihak kepada ekonomi masyarakat lokal telah menghambat penciptaan lapangan kerja yang signifikan (World Bank, 2017).

Sebagai negara yang 95% pendapatan ekspornya diperoleh dari sektor pertambangan, RDK masih memiliki pekerjaan rumah terkait diversifikasi pekerjaan. Setidaknya 80%

penduduk di Provinsi Haut-Katanga dan Lualaba bergantung penuh terhadap hasil pertambangan. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya regulasi pemerintah RDK terhadap kesejahteraan pekerja tambang. Lebih spesifik, pekerja artisan kobalt di RDK tidak memiliki wadah aspirasi layaknya organisasi atau serikat buruh (Rubbers, 2020). Hal tersebut menyebabkan para pekerja rentan mengalami tindakan sewenang-wenang dan pemecatan sepihak oleh perusahaan.

Kegagalan diversifikasi sektor kerja menyebabkan suatu daerah bersama penduduknya akan stagnan pada bidang pekerjaan tertentu. Terlebih pada sektor pertambangan informal yang pada praktiknya marak ditemui pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya terkait pekerja anak. Di sisi lain, permasalahan tersebut muncul akibat penduduk suatu daerah teridentifikasi tidak memiliki *skill* yang mumpuni. Minimnya kualitas dan akses memperoleh pendidikan menjadi alasan utama.

Emerson dan Souza (2003: 380) menerangkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk bekerja telah mengurangi masa untuk menempuh pendidikan bagi anak dan berakhir dengan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak ketika dewasa. Melalui studi empirisnya, ditemukan bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan secara maksimal dan optimal memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh gaji yang tinggi ketika ia menginjak usia dewasa.

Pekerja artisan kobalt di RDK ialah buruh tidak terampil yang mendapatkan upah sangat rendah. Tidak mengherankan jika keseluruhan penambang dewasa berkeinginan untuk bekerja pada jenis pekerjaan dengan prospek yang menjanjikan (misalnya montir, pengemudi, administrator, pekerja agronomi, hingga penjahit) (World Vision, 2013). Alasan di balik tindakan tersebut tentunya ingin memperoleh kualitas hidup yang lebih baik sebagai pijakan untuk memutus rantai kemiskinan.

Di RDK, rumah tangga yang bergiat pada sektor pertambangan artisanal cenderung berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut terjadi akibat minimnya kesempatan untuk memperoleh akses pekerjaan pada bidang terampil. Pada titik ini, siklus *poverty traps* akan terulang menuju tahapan yang mana anak-anak tidak dapat bersekolah. Akses pendidikan yang tidak gratis diikuti dengan lemahnya regulasi subsidi oleh pemerintah RDK, menyebabkan sektor pendidikan bukan menjadi prioritas bagi keluarga miskin.

## PENUTUP

Ketergantungan dan kemiskinan menjadi determinan munculnya hambatan dalam upaya RDK mengeliminasi pekerja anak di pertambangan artisanal kobalt. Teori dependensi menilai ketergantungan RDK sebagai imbas dari tindakan ekspansif bangsa Eropa berupa eksploitasi sumber daya kobalt demi kepentingan kolonialis. Perdagangan transnasional juga berperan signifikan mempertahankan kondisi ketergantungan yang sekaligus menjadi embrio dari *International Division of Labour* (IDL). Sebagai negara pinggir (*periphery*), RDK dikonstruksikan menjadi tempat ekstraksi kobalt guna memenuhi kepentingan negara berkembang (*semi-periphery*) dan negara maju (*core*). Sistem yang ada mendikte RDK agar senantiasa mengeksport komoditas (kobalt mentah) yang notabene berharga murah serta berfluktuasi mengikuti permintaan global.

Lahirnya era *global capitalism* telah membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk mengoperasikan faktor produksinya di *host country*. CDM dan Huayou Cobalt ialah segelintir perusahaan asing yang bergerak di sektor pertambangan kobalt di RDK. Mereka menjadi aktor sentral dalam perdagangan kobalt global, khususnya pada sektor artisanal. Namun, kobalt yang mereka produksi nyatanya tidak bebas dari campur tangan pekerja anak. Pemerintah RDK pun terkesan tidak cukup berdaulat untuk mengatasi persoalan tersebut. *Class distinction* memandang fenomena itu sebagai upaya konsesi antara

pihak berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan atau kekayaannya. Bagi kelompok elite, permasalahan terkait isu pekerja tidak lebih penting dari pengejaran profit maksimum. Alhasil, pekerja artisan kobalt di RDK diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.

Pada gilirannya, ketergantungan RDK terhadap sektor ekstraktif kobalt telah menjurus kepada situasi kemiskinan ekstrem. *Poverty traps* hadir untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan yang persisten dengan fenomena pekerja anak. Di wilayah sabuk kobalt RDK (Provinsi Haut Katanga dan Lualaba), keluarga miskin cenderung mengirim anak mereka untuk bekerja di sektor pertambangan artisanal kobalt dalam rangka menambah pendapatan rumah tangga. Lingkaran kemiskinan telah menutup akses anak untuk bersekolah guna meningkatkan taraf hidup mereka. Maraknya praktik pernikahan dini serta minimnya diversifikasi pekerjaan berkontribusi terhadap sulitnya pengentasan praktik pekerja anak di pertambangan artisanal kobalt RDK.

Dalam upaya memperkaya khazanah disiplin ilmu Hubungan Internasional, penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat menelaah hambatan dari perspektif kultural masyarakat RDK. Keputusan yang berbalut kepentingan para elite di RDK juga dapat dianalisis melalui berbagai teori seperti politik birokrasi dan *rational actor model*. Penelitian berikutnya juga dapat membahas *locus* dan *tempus* yang sama, namun dengan mengangkat topik terkait rezim lingkungan. Lebih lanjut, teori dan konsep dalam penelitian ini berpotensi untuk diterapkan pada studi kasus di negara lain perihal hambatan dalam upaya menghapus praktik pekerja anak. Bahkan dalam studi kasus yang sama, penelitian selanjutnya dapat menganalisis aktor perusahaan multinasional yang berbeda.

## Daftar Pustaka

Aanval, Y., Priadarsini, N., & Widya Nugraha, A. (2020). Upaya International Labour Organization (ILO) Melalui IPEC Dalam Menanggulangi

- Masalah Hak Pekerja Anak Pada Sektor Pertambangan di Mongolia Tahun 2005-2010. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, Vol. 1 No. 2, hal. 1-15.
- ABC News. (2022). *Blood Cobalt: The Congo's Dangerous and Deadly Green Energy Mines | Foreign Correspondent*, Tersedia di: [https://www.youtube.com/watch?v=\\_V3bIzNX4co&t=1382s&ab\\_channel=ABCNewsIn-depth](https://www.youtube.com/watch?v=_V3bIzNX4co&t=1382s&ab_channel=ABCNewsIn-depth) Diakses 14 Mei 2023.
- Ahmad, A. (2013). Poverty, Education and Child Labour in Aligarh City-India. *Studies on Home and Community Science*, Vol. 6, No. 3, hal. 165-172.
- Al Barazi, Schütte, S., Analysen, Hintergrundinformationen, Näher, Vetter, S., Liedtke, Baier, Franken, G. (2017). *Cobalt from The DR Congo-Potential, Risks and Significance for The Global Cobalt Market 1*. Tersedia di: [https://www.bgr.bund.de/SharedDocs/GT\\_](https://www.bgr.bund.de/SharedDocs/GT_) Diakses 10 November 2022.
- Alvina, V., Wiranata, I., & Kawitri Resen, P. (2021). Strategi Fla Mendorong Nestlé Melakukan CSR dalam Bidang Pekerja Anak di Pantai Gading pada Tahun 2012-2017. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, Vol. 1 No. 1, hal. 177-188.
- Amnesty International & AfreWatch. (2016). " *This is what We Die For*": Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt. London: Amnesty International.
- Basu, K., & Van, P. (1998), The Economics of Child Labor. *American Economic Review*, Vol. 88, No. 3, hal. 412-427.
- Butt, D. (2013). Colonialism and Postcolonialism. *International Encyclopedia of Ethics*. Vol. 1, No. 1, hal. 892-898.
- Clark, S., Smith, M., Wild, F. (2008). *China in Africa: Young Workers, Deadly Mines*. Tersedia di: <https://www.anderson.ucla.edu/documents/areas/adm/loeb/09h58.pdf> Diakses 23 November 2022.
- CNN. (2018). *CNN discovers child labor in cobalt trade*. Tersedia di: <https://edition.cnn.com/videos/world/2018/05/02/cnn-freedom-project-electric-cars-cobalt-elbagir-pkg.cnn> Diakses 23 November 2022.
- Cooper, A., & Bayer, C. (2019). *Worst Forms of Child Labour in the Democratic Republic of the Congo: Cobalt Refiner Due Diligence Reporting*. Tersedia di: [https://www.academia.edu/43763413/Cobalt\\_Refiner\\_Due\\_Diligence\\_Reporting](https://www.academia.edu/43763413/Cobalt_Refiner_Due_Diligence_Reporting) Diakses 10 Januari 2023.
- Dewi, A., Kumala Dewi, P., & Kurnia Putri, P. (2022). Penyebab Kegagalan Pengentasan Masalah Pekerja Anak di Tambang Mika Jharkhand India. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, Vol. 2 No. 1, hal. 47-60.
- Dias, P., Blagoeva, D., Pavel, C., Arvanitidis, N. (2018). Cobalt: demand-supply balances in the transition to electric mobility. *European Commission, Joint Research Centre*, Vol. 1, No. 1, hal. 1-104.
- Dwibedi, J. K., & Chaudhuri, S. (2007). Globalization, consumerism and child labour. *Social Science Research Network Inc*, Vol. 1, No. 1, hal. 1-15.
- Edmonds, E. & Pavcnik, N. (2006). International Trade and Child Labor: Cross-Country Evidence. *Journal of International Economics*, Vol. 68, No. 1, hal. 115-140.
- Emerson, P. M., & Souza, A. P. (2003). Is there a child labor trap? Intergenerational persistence of child labor in Brazil. *Economic development and cultural change*, Vol. 51, No. 2, hal. 375-398.
- Frank, A. (1980). The New International Division of Labour. *Millennium: Journal of International Studies*, Vol. 8, No. 3, hal. 282-284.
- Frankel. (2016). *This is where your smartphone battery begins*. Tersedia di: <https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-lithium-ion-battery/> Diakses 10 Desember 2022.

- Ghosh, B. (2019). *Dependency Theory Revisited*. Oxfordshire: Routledge.
- Goethals, S., Okenda, J. P., & Mbaya, R. (2009). *Chinese Mining Operations in Katanga Democratic Republic of Congo, Rights and Accountability in Development (RAID)*. London: Studio.
- Green Car Congress. (2021). *DRC bans export of cobalt, copper concentrates*. Tersedia di: <https://www.greencarcongress.com/2021/05/20210530-drc.html> Diakses 1 Maret 2023.
- Gulley, A. (2022). One hundred years of cobalt production in the Democratic Republic of the Congo. *Resources Policy*, Vol. 79, No. 1, hal. 1-10.
- ICRW. (2006). *Child Marriage and Poverty*. Tersedia di: <https://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Poverty.pdf> Diakses 9 Februari 2023.
- ILO. (2011). *Children in Hazardous work: What we know, what we need to do*. Tersedia di: [https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS\\_155428/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_155428/lang--en/index.htm) Diakses 7 Februari 2023.
- ILO. (2017). *Ratifications of ILO conventions: Ratifications for Democratic Republic of the Congo*. Tersedia di: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200\\_COUNTRY\\_ID:102981](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102981) Diakses 6 September 2022.
- Jacques, M., Sathiya, A., Ogujiuba, K., Nancy, S. (2017) Determinants of Early Marriage among Young Women in Democratic Republic of Congo, *Journal of Social Sciences*, Vol. 52, No. 3, hal. 82-91.
- Kahazi, L. (2018). *Cobalt prices soar, but Congo's small miners see little of the gain*. Tersedia di: <https://phys.org/news/2018-02-cobalt-prices-soar-congo-small.html> Diakses 1 Maret 2023.
- Kara S. (2018). *Is your phone tainted by the misery of the 35,000 children in Congo's mines?* Tersedia di: <https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/12/phone-misery-children-congo-cobalt-mines-drc> Diakses 8 September 2022.
- Köksal, E. (2006). The impact of multinational corporations on international relations: a study of American multinationals. Tersedia di: <https://open.metu.edu.tr/bitstream/handle/11511/16124/index.pdf> Diakses 9 November 2022
- Lim, K. (2017). International Division of Labor. *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology*, Vol. 1, No. 1, hal. 1-4.
- Matezo, L. (2020). International Import-Export Trade in the Democratic Republic of the Congo: Impact in Trade Balance. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, Vol. 9 No. 1, hal. 96-104.
- Matsuyama, K. (2010). *Poverty traps*. In *Economic Growth*. London: Palgrave Macmillan.
- McKinsey & Company. (2022). *What is supply chain?* Tersedia di: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-supply-chain> Diakses 14 Mei 2023.
- Meyer, S. (2018). *Photographing Congo's Cobalt Empire*. Tersedia di: <https://pulitzercenter.org/stories/photographing-congos-cobalt-empire> Diakses 14 Mei 2023.
- Minten, B., Randrianarison, L., Swinnen, M. (2009). Global Retail Chains and Poor Farmers: Evidence from Madagascar. *World Development*, Vol. 37, No. 11, hal. 1728-1741.
- Mucha, L., Frankel, T. C., & Karly, S. (2018). *The hidden costs of cobalt mining*. Tersedia di: <https://www.washingtonpost.com/news/insight/wp/2018/02/28/the-cost-of-cobalt/> Diakses 26 November 2022.
- Nabila, N. (2020). *Penyebab Ketidapatuhan Kongo Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Pertambangan Kobalt*. Tersedia di: [https://repository.unair.ac.id/100717/2/1.HALAM AN%20JUDUL.pdf](https://repository.unair.ac.id/100717/2/1.HALAM%20JUDUL.pdf) Diakses 10 September 2022.

- Namkoong, Y. (1999). Dependency theory: concepts, classifications, and criticisms. *International Area Review*, Vol. 2, No. 1, hal. 121-150.
- Nzongola-Ntalaja, G. (2002). *The Congo from Leopold to Kabila: A People's History*. London: Zedbooks.
- OCHA. (2015). *Key Figures-Democratic Republic of the Congo*. Tersedia di: <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/child-labour-drc-key-figures> Diakses 22 November 2022.
- OCHA (2017). *DR Congo risks losing its next generation-Democratic Republic of the Congo*. Tersedia di: <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/dr-congo-risks-losing-its-next-generation> Diakses 8 Februari 2023.
- Ray, R. (2002). The Determinants of Child Labour and Child Schooling in Ghana. *Journal of African Economies*, Vol. 11, No. 4, hal. 561–590.
- Reuters. 2018. *China's Zhejiang Huayou to invest \$147 mln in copper project in DRC*. Tersedia di: <https://www.reuters.com/article/china-metals-copper-drc-idUKL3N1YU1K3> Diakses 14 Mei 2023.
- Rubbers, B. (2020). Mining boom, labour market segmentation and social inequality in the Congolese Copperbelt. *Development and Change*, Vol. 51, No. 6, hal. 1555-1578.
- Santos, T. (1970). The structure of dependence. *The American Economic Review*, Vol. 60, No. 2, hal. 231-236.
- Scheele, F., de Haan, E., Kiezebrink, V. (2016). *Cobalt blues: Environmental pollution and human rights violations in Katanga's copper and cobalt mines*. Amsterdam: SOMO.
- Schmidt (2017). *Latin American Dependency Theory | Global South Studies*. Tersedia di: <https://globalsouthstudies.as.virginia.edu/key-thinkers/latin-american-dependency-theory> Diakses 9 November 2022.
- Shedd, K. (2018). *2018 Minerals Yearbook; Cobalt [Advance Release]*. Tersedia di: <https://pubs.usgs.gov/myb/vol1/2018/myb1-2018-cobalt.pdf> Diakses 1 Maret 2023.
- Tahirih Justice Center. (2020). *Child Marriage Poses Serious Risks to Children Tahirih Justice Center*. Tersedia di: <https://www.tahirih.org/pubs/child-marriage-poses-serious-risks-to-children/> Diakses 10 Mei 2023.
- Tsurukawa, N., Prakash, S., Manhart, A. (2011). *Social impacts of artisanal cobalt mining in Katanga, Democratic Republic of Congo*. Öko-Institut eV, Freiburg.
- US Department of Labor. (2014). *Findings on The Worst Forms of Child Labor*. Tersedia di: <http://developer.dol.gov/child-labor> Diakses 20 Mei 2023.
- US Geological Survey. (2022). *Cobalt Statistics and Information*. Tersedia di: <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/cobalt-statistics-and-information> Diakses 7 September 2022.
- Wangusa, D. (2014). *Multinational corporations, human rights and child labour in Ghana*. Tersedia di: [http://humantraffickingsearch.org/wp-content/uploads/2017/07/Wangusa\\_Multinational\\_2014.pdf](http://humantraffickingsearch.org/wp-content/uploads/2017/07/Wangusa_Multinational_2014.pdf) Diakses 10 September 2022.
- WHO. (2006). *Concise International Chemical Assessment Document 69: Cobalt and Inorganic Cobalt Compounds*. Tersedia di: <http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/cicad69%20.pdf> Diakses 7 Februari 2023.
- World Bank. (2017). *Least developed countries: UN classification | Data*. Tersedia di: <https://data.worldbank.org/country/XL> Diakses 5 Mei 2023.
- World Bank. (2018). *Overview*. Tersedia di: <https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview> Diakses 7 Februari 2023.
- World Vision. (2013). *Key Findings on Children and Artisanal Mining in Kambove DRC*. Tersedia di: <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/child-miners-speak-key-findings-children-and-artisanal-mining> Diakses 20 Maret 2023.